

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.04

disusun menggunakan Aplikasi Penyusunan LK dan CALK Satker versi 2020.4

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banjarbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Banjarbaru, 25 Januari 2021

~~Sekretaris~~

Fauzan Rahman, S.Sos., S.H.
NIP 19810920.200604.1.009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Banjarbaru, 25 Januari 2021

~~sekretaris~~

Fauzan Rahman, S.Sos., S.H.
NIP 19810920.200604.1.009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Ringkasan Laporan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	1
III Laporan Operasional	1
IV Laporan Perubahan Ekuitas	2
V Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	3
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis.....	3
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.3 Basis Akuntansi.....	4
A.4 Dasar Pengukuran	4
A.5 Kebijakan Akuntansi	4
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	8
B.1 Pendapatan	8
B.2 Belanja.....	9
B.3 Belanja Pegawai.....	10
B.4 Belanja Barang	10
B.5 Belanja Modal.....	11
B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran.....	13
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	13
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	13
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	13
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas.....	13
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	14
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment).....	14
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	14
C.7 Piutang Bukan Pajak	14

c.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	15
c.9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	15
c.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	15
c.11	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Persediaan.....	15
c.12	Persediaan yang Belum Diregister	16
c.13	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	16
c.14	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran.....	16
c.15	Piutang Jangka Panjang lainnya	16
c.16	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	17
c.17	Tanah	17
c.18	Tanah Belum Diregister.....	17
c.19	Peralatan dan Mesin.....	18
c.20	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	18
c.21	Gedung dan Bangunan	18
c.22	Gedung dan Bangunan Belum Diregister.....	18
c.23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
c.24	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister.....	19
c.25	Aset Tetap Lainnya.....	19
c.26	Aset Tetap yang Belum Diregister.....	19
c.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19
c.28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	20
c.29	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	20
c.30	Aset Tak Berwujud	20
c.31	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	21
c.32	Aset Lain-lain.....	21
c.33	Aset Lainnya yang Belum Diregister	21
c.34	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	21
c.35	Utang kepada Pihak Ketiga.....	22
c.36	Utang Yang Belum Ditagihkan	22
c.37	Hibah Yang Belum Disahkan	22

c.38	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	22
c.39	Pendapatan Diterima Dimuka.....	23
c.40	Uang Muka dari KPPN	23
c.41	Utang Jangka Pendek Lainnya	23
c.42	Ekuitas	23
c.43	Catatan Penting Lainnya neraca	24
c.44	Ekuitas	24
c.45	Catatan Penting Lainnya Neraca	24
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	24
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	24
D.2	Beban Pegawai	24
D.3	Beban Persediaan	25
D.4	Beban Barang dan Jasa	25
D.5	Beban Pemeliharaan	25
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	25
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	26
D.8	Beban Bantuan Sosial	26
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	26
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	27
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.....	27
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	27
D.14	Pos Luar Biasa	27
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	27
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
E.1	Ekuitas Awal	28
E.2	Surplus (Defisit) LO	28
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ..	28
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	28
E.5	Transaksi Antar Entitas	29
E.6	Ekuitas Akhir.....	30
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	30
vi.	Lampiran dan Daftar	31

DAFTAR TABEL

1. Kualitas Piutang
2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019
6. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan TA 2019
7. Perbandingan PNBPN Lainnya TA. 2020 dan 2019
8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020
9. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019
10. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019
11. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019
12. Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan 2019
13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 d
14. Rincian Kas di Bendaharan Pengeluaran TA 2020 2019
15. Kas Lainnya dan Setera Kas TA 2020 dan 2019
16. Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019
17. Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tanah
18. Rincian Tanah TA 2020
19. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
20. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
21. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020
23. Mutasi Aset Tak Berwujud
24. Mutasi Aset Lain-Lain
25. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya
26. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
27. Rincian Uang Muka dari KPPN
28. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019
29. Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019
30. Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019
31. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019
32. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019
33. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019
34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortasi TA 2020 dan 2019
35. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2020 dan 2019
36. Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70,135,000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70,135,000 atau mencapai 208.74 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp33,600,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,500,000 atau mencapai 100.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1,500,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp3,578,835 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3,578,835; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3,578,835

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70,135,000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1,723,366 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp68,411,634, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp68,411,634.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp2,462,005, ditambah Surplus-LO sebesar Rp68,411,634 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -67,294,804 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp3,578,835

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A1. Profil dan Kebijakan Teknis

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis

1. Kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Menjunjung asas peradilan dengan mengupayakan proses peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM baik dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan.
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana peradilan sesuai DIPA.
 - d. Meningkatkan etos kerja yang harmonis dan kesejahteraan pegawai.
 - e. Mempererat hubungan antara instansi baik sesama maupun instansi pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan hukum.
2. Program-program kerjanya sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan profesionalitas, integritas dan moralitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
 - b. Peningkatan mutu dan kualitas SDM.
 - c. Melengkapi sarana dan prasarana melalui peningkatan pada anggaran (DIPA) 2020 termasuk bangunan gedung baru beserta fasilitasnya.
 - d. Meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.
 - e. Turut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tidak mengurangi indenpensi dalam penegakan hukum dan keadilan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Mengoptimalkan secara rutin rapat-rapat koordinasi, diskusi dan membuat rumusan-rumusan dalam memecahkan suatu permasalahan.
 - b. Turut sertanya para pejabat dan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh MA, PTA, KPPN atau instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tugas pokok peradilan baik teknis maupun non teknis yudisial.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banjarbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang) menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,	20

Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	25
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	33,600,000	33,600,000
Jumlah Pendapatan	33,600,000	33,600,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1,500,000	1,500,000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	1,500,000	1,500,000

Realisasi Pendapatan Rp70,135,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70,135,000 atau mencapai 208.74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp33,600,000. Pendapatan Pengadilan Agama Banjarbaru terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70,135,000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	33,600,000	70,135,000	#####
Jumlah	33,600,000	70,135,000	#####

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 2.63 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	70,135,000	72,026,400	(2.63)
Jumlah	70,135,000	72,026,400	(2.63)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp70,135,000

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp70,135,000 dan Rp72,026,400. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 2.63 dari TA 2019 Pada tahun 2020 Pendapatan Negara Bukan Pajak terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan terjadi penurunan pada Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Peradilan dan Pendapatan Keiaksanaan dan Peradilan Lainnya.. Rincian Penerimaan Negara Bukan

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	70,135,000	72,026,400	(2.63)
Jumlah	70,135,000	72,026,400	(2.63)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Ongkos Perkara	23,670,000	29,135,000	(18.76)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	42,000	(100.00)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	46,465,000	42,849,400	8.44
	-	-	-
Jumlah	70,135,000	72,026,400	(2.63)

Realisasi Belanja Rp1,500,000

B.2 Belanja

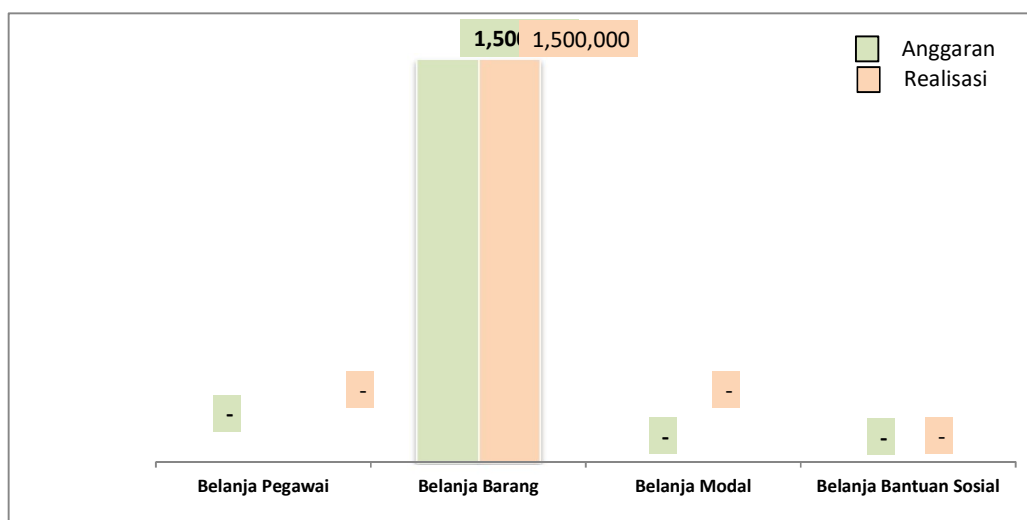
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp1,500,000 atau 100.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.1,500,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,500,000	1,500,000	#####
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,500,000	1,500,000	#####

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 sebesar 0,00% Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi belanja pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,500,000	1,500,000	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,500,000	1,500,000	-

Realisasi Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar 0,00 % dari TA 2019. Hal ini disebabkan Tidak ada Belanja Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Barang Rp1,500,000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,500,000 dan Rp1,500,000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar 0,00% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Tidak ada kenaikan atau penurunan dalam belanja barang pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	1,500,000	1,500,000	-
Jumlah Belanja Kotor	1,500,000	1,500,000	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,500,000	1,500,000	-

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh Tidak ada belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada belanja modal tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-

Jumlah Belanja	-	-	-
----------------	---	---	---

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan Tidak ada Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan Tidak ada Belanja Modal Lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2019. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada Belanja Modal Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
----------------------	---------------------	---------------------	---

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Rekening BRI Cabang Martapura A/C 0242-01-000445-30-9	-	-
Rekening BRI Cabang Martapura A/C 0242-01-000580-30-3	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

1. PT.BANK BRI PERSERO (Tbk) KC MARTAPURA A/C 0242-01-000445-30-9 a.n. BPG 045 PA BANJARBARU 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
2. PT.BANK BRI PERSERO (Tbk) KC MARTAPURA A/C 0242-01-000580-30-3 a.n. BPG 045 PA BANJARBARU 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

tidak ada rekening bendahara penerimaan

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Jumlah	14,353,500	17,031,500
---------------	-------------------	-------------------

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru A/C 0196064312 a.n. RPL 045 PA BANJARBARU yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.14.353.500,-

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

tidak ada belanja dibayar dimuka dan pendapatan YMHD

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

tidak ada uang muka belanja

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

tidak ada pendapatan yang masih harus diterima

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.7 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Jenis	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp3,578,835 dan Rp2,462,005. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Barang Konsumsi	3,578,835	2,462,005
	-	-
Jumlah	3,578,835	2,462,005

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi persediaan dalam keadaan baik

C.14 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0*

C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

U R A I A N	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0*

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-

Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp0

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai tanah. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada tanah yang dikuasai / digunakan oleh pihak ketiga

Tanah Belum Diregister Rp0

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp0

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Tidak ada mutasi tambah peralatan dan mesin

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

C.23 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah Gedung dan Bangunan selama periode tahun 2020

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Gedung dan Bangunan selama periode tahun 2020

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode tahun 2020

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode tahun 2020

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak ada mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama periode tahun 2020.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama periode tahun 2020.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. tidak ada konstruksi dalam pengerjaan Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada tidak ada mutasi kemitraan dengan pihak ketiga. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
-		-
Jumlah		-

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Baniarbaru berupa Tidak ada aset tak berwujud. Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- tidak ada mutasi tambah atau kurang terhadap aset tak berwujud pada tahun

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. tidak ada mutasi tambah atau kurang pada ATB dalam pengerjaan. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	-

Nilai Buku per 31 Desember 2020	-
--	---

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- tidak ada mutasi tambah terhadap aset lain-lain

Mutasi Kurang

- tidak ada mutasi kurang terhadap aset lain-lain

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tidak ada utang kepada pihak ketiga

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
---------------	---------------------------	---------------------------

	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

tidak ada utang yang belum ditagihkan

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

tidak ada hibah yang belum disahkan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

tidak ada utang kelebihan pembayaran pendapatan

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

tidak ada pendapatan diterima dimuka

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Tidak ada saldo kas di rekening bendahara

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tidak ada utang jangka pendek lainnya

Ekuitas Rp3,578,835

C.44 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,578,835. dan Rp2,462,005. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp70,135,000

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp70,135,000 dan Rp72,026,400. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2.63. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 bersumber dari Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya.. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah	-	42,000.00	(100.00)
Pendapatan Ongkos Perkara	23,670,000	29,135,000.00	(18.76)
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan	46,465,000	42,849,400.00	8.44
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	70,135,000.00	72,026,400.00	(2.63)

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Tidak ada beban pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
--------	--------------------	---------------------	---

Beban Persediaan
Rp223,366

	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp223,366 dan Rp2,774,132

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 91.95 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Menurunnya beban persediaan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya jumlah persediaan.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Persediaan konsumsi	223,366	2,774,132	(91.95)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	223,366.00	2,774,132	(91.95)

Beban Barang dan Jasa
Rp1,500,000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,500,000 dan Rp1,500,000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Tidak ada kenaikan atau penurunan beban barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	1,500,000	-
	-	-	-
Jumlah	1,500,000	1,500,000.00	-

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Tidak ada beban pemeliharaan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar 0,00 persen disebabkan oleh Tidak ada beban perjalanan dinas. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh tidak ada beban barang untuk diserahkan ke masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh tidak ada beban bantuan sosial. Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0*

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0*

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0*

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

tidak ada pos-pos luar biasa

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

tidak ada catatan penting lainnya

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp2,462,005.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.2,462,005.00 dan Rp.3,930,537.00

*Defisit LO
Rp.68,411,634.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.68,411,634.00 dan Rp.67,752,268.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. tidak ada koreksi atas reklasifikasi

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari tidak ada selisih revaluasi aset tetap pada tahun 2020

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-

Jumlah	-
---------------	---

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini tidak ada koreksi nilai aset non revaluasi.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah tidak ada koreksi lain-lain. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp-67,294,804

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-67,294,804 dan Rp.-69,220,800. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,500,000
Diterima dari Entitas Lain	(70,135,000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1,340,196
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	(67,294,804)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 1,500,000, sedangkan DDEL sebesar Rp 70,135,000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-

Jumlah	-
---------------	---

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1,340,196 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp3,578,835*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3,578,835.00 dan Rp.2,462,005.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

tidak ada catatan penting lainnya mengenai Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada